

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018.09.648673  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024**

**Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen  
Pertanian**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 (Audited)



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

***Jl. Tentara Pelajar No. 10. Bogor (16114)***

**Jawa Barat**

**Telepon (0251) 8351277 – Faxsimile (0251) 8350928**

**E-mail:bbp2tp@litbang.deptan.go.id**

## KATA PENGANTAR

Inovasi pertanian merupakan komponen kunci dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi kondisi sumberdaya yang semakin terbatas serta perubahan iklim global. Perubahan lingkungan strategis serta respon terhadap perubahan strategi pembangunan pertanian nasional, menuntut ketersediaan inovasi pertanian yang semakin meningkat. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) sebagai institusi yang mendapatkan tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian, terhadap produk, proses, dan jasa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri. BBPSIP sebagai institusi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian, memiliki ruang yang luas untuk berkiprah dalam mendukung pembangunan pertanian.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

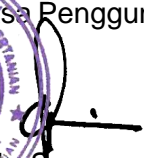
Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Bogor, 31 Desember 2024  
Kepala Pengguna Anggaran,

  
Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc  
NIP. 19670514 199703 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak (netto)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /TGR

C.1.8. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Peralatan dan Mesin

C.2.2. Gedung dan Bangunan

C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

- D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Transaksi Antar Entitas
  - E.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc

NIP. 19670514 199703 1 002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp129,614,85.00 atau mencapai 864% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp15,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp26,132,572,496.00 atau mencapai 91% dari alokasi anggaran sebesar Rp28,776,116,000.00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp14,258,619,109.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp495,212,515.00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp13,712,805,223.00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp44,801,371.00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5,800,000.00 Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp00 dan Nilai ekuitas sebesar Rp14,258,619,109.00 dan Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14,258,619,109.00

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7,488,146.00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp26,480,649,528.00 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp26,473,161,382.00 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp97,129,000.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp26,376,032,382.00

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp14,641,883,853.00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp26,376,032,382.00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp25,992,767,638.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14,258,619,109.00

## **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	15,000,000	129,614,185	864%	37,799,134
Jumlah Pendapatan		15,000,000	129,614,185	864%	37,799,134
Belanja					
Belanja Pegawai	B.3	5,783,160,000	5,529,948,121	96%	5,102,229,025
Belanja Barang	B.4	22,054,956,000	20,174,446,375	91%	19,387,897,357
Belanja Modal	B.5	938,000,000	428,178,000	46%	490,901,352
Jumlah Belanja		28,776,116,000	26,132,572,496	91%	24,981,027,734



**II. NERACA****BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
NERACA****PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	451.612.180	461.802.853
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	8.698.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	(26.365)	
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4.	8.671.635	-
persediaan	C.1.8	34.928.700	4.685.500
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>495.212.515</b>	<b>466.488.353</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	11.807.303.426	14.454.743.416
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	16.015.401.867	15.838.113.867
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.3.	1.544.823.300	1.544.823.300
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	442.324.564	442.324.564
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	(16.097.047.934)	(18.179.500.958)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>13.712.805.223</b>	<b>14.100.504.189</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	45.026.504	81.046.376
Penyisihan Piutang tidak tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi	C.3.2	(225.133)	(405.232)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>44.801.371</b>	<b>80.641.144</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.4.1.	3.272.329.990	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset tetap Lainnya	C.4.2.	(3.266.529.990)	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>5.800.000</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>14.258.619.109</b>	<b>14.647.633.686</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3.	-	5.749.833
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>-</b>	<b>5.749.833</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>-</b>	<b>5.749.833</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.	14.258.619.109	14.641.883.853
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>14.258.619.109</b>	<b>14.641.883.853</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>14.258.619.109</b>	<b>14.647.633.686</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	7.488.146	17.634.760
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>7.488.146</b>	<b>17.634.760</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	5.526.523.121	5.102.229.025
Beban Persediaan	D.3.	959.467.947	1.315.741.355
Beban Barang dan Jasa	D.4.	10.760.010.035	11.327.373.576
Beban Pemeliharaan	D.5.	2.552.579.021	1.519.231.570
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	5.871.951.172	5.224.970.906
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	195.000	-
Beban Penyusunan dan Amortisasi	D.9.	810.076.966	1.047.357.131
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.10.	(153.734)	(135.033)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>26.480.649.528</b>	<b>25.536.768.530</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(26.473.161.382)</b>	<b>(25.519.133.770)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	97.129.000	7.237.250
Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya	D.11.	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>97.129.000</b>	<b>7.237.250</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(26.376.032.382)</b>	<b>(25.511.896.520)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1.	14.641.883.853	15.197.098.920
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	- 26.376.032.382	(25.511.896.520)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	E.3.	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	25.992.767.638	24.956.681.453
Kenaikan/Penurunan EKUITAS	E.5.	- 383.264.744	(555.215.067)
EKUITAS AKHIR	E.6.	14.258.619.109	14.641.883.853

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

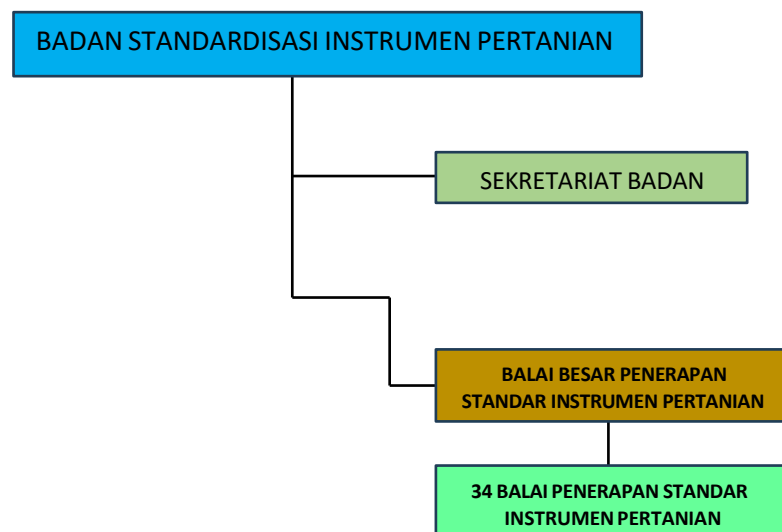
### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. **Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian**

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) merupakan salah satu Unit Kerja (UK) yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BBPSIP memiliki tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Dalam tata hubungan kerjanya, BBPSIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi dengan dukungan 33 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau lebih dikenal sebagai BBPSIP sesuai dengan Perpres No.13 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan salah satu unit kerja Badan Standard Instrumen Pertanian (BSIP) memiliki tugas utama untuk melaksanakan Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Selain tugas utama tersebut, Kepala BSIP Pertanian juga memberikan mandat untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian; pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian; koordinasi pelaksanaan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi; pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga balai besar

Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi, setiap unit kerja/unit pelaksana teknis (UK/UPT) dituntut untuk memiliki standar performance sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan baik.



Gambar 1. Susunan Organisasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

## Organisasi dan Tata Kelola

### Landasan Hukum

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tugas utama BBPSIP adalah melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BBPSIP mempunyai fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian
2. Pelaksanaan kordinasi penerapan standar instrumen pertanian
3. Pelaksanaan kordinasi Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional
5. Pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian
6. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP

Disamping melaksanakan tugas pokoknya, BBPSIP diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) seluruh Indonesia

## STRUKTUR ORGANISASI & SDM

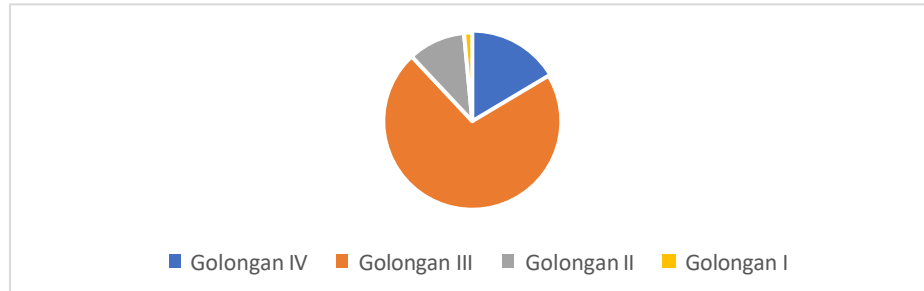
Struktur Organisasi BBPSIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 disajikan pada Gambar 2. Kepala BBPSIP, Bagian Tata usaha (TU), Kelompok Program dan Evaluasi (PE) dan Kelompok kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian (KSPHP) serta kelompok jabatan fungsional.



Gambar 3 struktur organisasi BBPSIP

Pada tanggal 2 Januari 2024 telah dilakukan pengukuhan kelompok substansi dan ketua tim kerja yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BSIP Nomor 32/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Kelompok Subtansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan surat keputusan tersebut struktur organisasi BBPSIP hanya mempunyai dua pejabat struktural yaitu Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Kepala Bagian Tata Usaha. Pimpinan tertinggi adalah Kepala BBPSIP, yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga, Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara dan Ketua Tim Kerja Kepegawaian. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi dibantu oleh Ketua Tim Kerja Program dan Ketua Tim Kerja Evaluasi. Ketua Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian dibantu oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi dan Ketua Tim Kerja Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi yang utama untuk mendukung suatu organisasi sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Jumlah pegawai BBPSIP per 31 Desember 2024 sebanyak 67 orang terdiri dari 11 orang golongan IV, 48 orang golongan III, 7 orang golongan II dan 1 orang golongan I dengan keragaan berdasarkan kepangkatan dan golongan yaitu :



Berdasarkan kelompok jabatan fungsional pegawai BBPSIP per 31 Desember 2024 terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
<b>1. Penyuluh</b>	<b>17</b>
- Penyuluh Madya	5
- Penyuluh Muda	9
- Penyuluh Pertama	3
<b>2. Analis SDM Aparatur/ Pranata SDM Aparatur</b>	<b>5</b>
- Analis SDM Aparatur Muda	2
- Analis SDM Aparatur Pertama	1
- Pranata SDM Aparatur Terampil	2
<b>3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pranata Keuangan APBN</b>	<b>6</b>
- Analis Pengelolaan Keuangan Muda	2
- Analis Pengelolaan Keuangan Pertama	3
- Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
<b>4. Perencana</b>	<b>8</b>
- Perencana Madya	1
- Perencana Muda	6
- Perencana Pertama	1
<b>5. Pranata Hubungan Masyarakat</b>	<b>2</b>
- Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1
- Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1
<b>6. Pranata Komputer</b>	<b>2</b>
- Pranata Komputer Pertama	2
<b>7. Pustakawan</b>	<b>2</b>
- Pustakawan Pertama	2
<b>8. Jabatan Fungsional Umum</b>	<b>24</b>

Komposisi jabatan fungsional di BBPSIP didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu 42 orang dan 24 orang fungsional umum yang terdiri dari tenaga administrasi pendukung yang terdistribusi pada bidang atau bagian yang menangani urusan pada kegiatan program dan penganggaran, kerjasama dan teknologi informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semester 1 Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya realokasi anggaran. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	15.000.000	15.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.401.480.000	5.269.132.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPK	211.098.000	211.328.000
Belanja Lembur	187.920.000	302.700.000
Belanja Barang operasional	3.799.782.000	3.567.016.000
Belanja Barang Non Operasional	2.243.205.000	6.503.728.000
Belanja Barang Persediaan	887.587.000	1.231.809.000
Belanja Jasa	936.476.000	1.643.647.000
Belanja Pemeliharaan	2.553.008.000	2.493.761.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.765.200.000	6.614.995.000
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	25.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	253.630.000	253.630.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.370.000	684.370.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20.744.756.000</b>	<b>28.776.116.000</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp129,614,185.00 atau mencapai 864% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp15,000,000.00 Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	36.019.872,00	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi dan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.000.000,00	1.738.313,00	11,59
Pendapatan lain-lain (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu)		3.889.000,00	
Pendapatan lain-lain (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu)	0	87.967.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>129.614.185,00</b>	<b>864,09</b>

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan sebesar 242.90% dibandingkan TA 2023 dikarenakan adanya pembayaran pengembalian tunjangan jabatan fungsional dan pengembalian biaya tugas belajar. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	2023	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	36.019.872,00	27.006.624	33,37
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.738.313,00	3.555.260	(51,11)
Pendapatan Lain-Lain	91.856.000,00	7.237.250	1.169,2
<b>Jumlah</b>	<b>129.614.185</b>	<b>37.799.134</b>	<b>242,90</b>

Realisasi pendapatan pada 31 Desember 2024 Rp129,614,185.00 atau sebesar 864% dari estimasi pendapatan, yaitu :

1. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp36,019,872.00 merupakan :
  - Pendapatan dari setoran TP/TGR An. Sabilal Fahri, M.Si berupa pengembalian biaya tugas belajar Rp36,019,872.00 dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut :
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Januari tanggal 01 Januari 2024 dengan nomor NTPN 240231504000024 sebesar Rp3,001,656.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Maret tanggal 01 Maret 2024 dengan nomor NTPN 240231504000025 sebesar Rp3,001,656.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan April tanggal 01 April 2024 dengan nomor NTPN 2402315040000153 atas koreksi pembayaran bulan Januari dan Maret sebesar Rp9,004,968.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Mei tanggal 01 Mei 2024 dengan nomor NTPN 2402315040000251 sebesar Rp3,001,656.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Juni tanggal 01 Juni 2024 dengan nomor NTPN 2402315040000310 sebesar Rp3,001,656.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Juli tanggal 01 Juli 2024 dengan sebesar Rp3,001,656.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Agustus tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp3,001,656.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan September tanggal 01 September 2024 sebesar Rp3,001,656.00
    - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Oktober tanggal 01 September 2024 sebesar Rp3,001,656.00



- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan November tanggal 01 November 2024 sebesar Rp3,001,656.00
  - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Desember tanggal 01 Desember 2024 sebesar Rp3,001,656.00
2. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1,738,313.00 merupakan :
- Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess dengan nomor NTPN A92DC48VV95S1MO8
  - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess pembayaran pada bulan Juli 2024
  - Pendapatan Penggunaan rumah dinas Rp138,313 pada bulan Desember 2024
3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp 91,856,000.00 merupakan :
- Penerimaan kembali belanja Pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp87,967,000.00, terdiri dari :
    - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian uang perjadiin kegiatan peternakan TA 2023 sebesar Rp457,000.00
    - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian uang perjadiin kegiatan peternakan TA 2023 sebesar Rp1.577,000.00 SPM no 00921A
    - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian uang perjadiin kegiatan Program TA 2023 sebesar Rp30,000.00 SPM no 0000994A
    - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian uang Transport kegiatan Diseminasi Hasil SIP GU/TUP TA 2023 sebesar Rp700,000.00
    - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian uang Biaya Penginapan kegiatan SPI TA 2023 sebesar Rp1,125,000.00 SPM No 00957A
    - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Rima Purnamayani, SP, M.Si sebesar Rp11,700,000.00 NTPN 91DDF7QLUOTG4OAC
    - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Widia Siska sebesar Rp1,445,000.00 NTPN DA9586U8EUGURDVL

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Anggela T sebesar Rp1,200,000.00 NTB : 240405334402 , NTPN : 9DD1048VVEMGPPV5
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Widia Siska sebesar Rp1,445,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Nandang sebesar Rp31,320,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Widia Siska sebesar Rp1,445,000.00 NTPN 9CF6448VVESF7EUO
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Enti sebesar Rp1,054,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Widia Siska sebesar NTPN E4CB761QV47T1K6M Rp1,445,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Widia Siska, NTPN 612DE6U8EUT7UI8Q Rp1,445,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Enti, sebesar Rp7,893,000.00 NTPN 737FF7QLUP124HLS
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama an. Anggela NTB : 864003609244, NTPN : 5767F7QLUPL4ARD5 dengan nominal Rp8,880,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Widia Siska, NTB 241203022489, NTPN DDEF36U8EV5FRDC8 Rp1,140,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Widia Siska, NTB 241220034573, NTPN 534FD6U8V60HK8P Rp1,890,000.00

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Fungsional TA 2023 atas nama Disu Wahyudi, NTB 241212022552, NTPN 5EF9048VVFEJH1JD Rp14,220,000.00
- Penerimaan kembali belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3,889,000.00 terdiri dari :
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp457,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,577,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023 (SPM No. 00921A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp30,000.00 merupakan Kembali uang perjadiin keg. Program TA.2023 (SPM No. 00994A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp700,000.00 yang merupakan Kembali uang biaya transport Keg. Diseminasi Hasil SIP TA.2023 (GU/TUP
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,125,000.00 merupakan Kembali uang biaya penginapan keg. SPI TA. 2023 (SPM LS no 00957A)

Terjadi selisih penerimaan bukan pajak pada LRA senilai Rp129,614,185.00 dengan pendapatan bukan pajak pada LO sebesar Rp7,488,146.00 yang merupakan Nominal Rp7,488,146.00 terdiri :

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.600,000,00 merupakan
  - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) Sewa Mess sampai dengan bulan September 2024 Rp1.600,000,00.
    - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess dengan nomor NTPN A92DC48VV95S1MO8
    - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess pembayaran pada bulan Juli 2024
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp5,888,146.00
  - Untuk nominal tersebut terdiri dari Pendapatan Penggunaan rumah dinas Rp138,313 pada bulan Desember 2024
    - Penggunaan rumah dinas sebesar Rp100,000.00 dan Rp38,313 melalui potongan SPM 00472A.
  - Untuk nominal terdiri dari Pendapatan Penggunaan sewa bangunan, yang sudah habis pakai Rp5,749,833.00

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2024

Uraian	2024		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.783.160.000	5.558.360.973	96,11
Belanja Barang	22.054.956.000	20.175.373.125	91,48
Belanja Modal	938.000.000	428.178.000	45,65
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>28.776.116.000</b>	<b>26.161.912.098</b>	<b>90,92</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>- 29.339.602</b>	
<b>Total Belanja</b>	<b>28.776.116.000</b>	<b>26.132.572.496</b>	<b>90,81</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja Semester II TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar 4.61 dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 8.38% disebabkan adanya mutasi masuk pegawai sebanyak 6 orang ke BBPSIP
2. Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 4.06% disebabkan adanya kegiatan teknis yang mendukung Tugas dan Fungsi BBPSIP.
3. Penurunan belanja modal sebesar -12.78% disebabkan pada akhir tahun 2024 masih terdapat pagu belanja modal yang masih diblokir sehingga berpengaruh pada realisasi belanja modal TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%. Naik/Turun
Belanja Pegawai	5.529.948.121	5.102.229.025	8,38
Belanja Barang	20.174.446.375	19.387.897.357	4,06
Belanja Modal	428.178.000	490.901.352	(12,78)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>26.132.572.496</b>	<b>24.981.027.734</b>	<b>4,61</b>

## B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,529,948,121.00 dan Rp5,102,229,025.00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS/PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester II TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8.38% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya 6 rang pegawai yang mutasi masuk ke BBPSIP sehingga realisasi tahun anggaran 2024 lebih besar dibanding tahun 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 - 12- 2024	Realisasi 31-12-2023	%. Naik/Turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.080.012.330	4.6.899.545	3,53
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	190.859.643	26.963.814	100,00
Belanja lembur PNS dan PPPK	287.489.000	173.031.000	66,15
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.558.360.973</b>	<b>5.106.894.359</b>	<b>8,84</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>28.412.852</b>	<b>4.665.334</b>	<b>509</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.529.948.121</b>	<b>5.102.229.025</b>	<b>8,38</b>

Belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNS dengan nominal Rp5,080,012,330.00 dan untuk belanja pegawai PPPK merupakan jumlah belanja gaji dan tunjangan PPPK yang dilakukan dari Januari sampai dengan Desember 2024 Rp190,859,643.00 Untuk belanja lembur PNS dan PPPK sebesar Rp287,489,000.00 merupakan belanja lembur yang dilakukan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20,174,446,375.00 dan Rp 19,387,897,357.00 Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4.06% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- a. Kenaikan belanja barang operasional sebesar 28.75% meliputi keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan pakaian dinas, honor operasional pengelola anggaran, honor petugas kebersihan dan pramubakti, satpam dan pengemudi, honor dokter dan tenaga kontrak. Kenaikan belanja barang operasional dikarenakan pada tahun anggaran 2024 terdapat kenaikan honor petugas kebersihan dan pramubakti, satpam dan pengemudi dan honor tenaga Kesehatan
- b. Penurunan belanja barang non operasional sebesar -12.47 % karena adanya efisiensi terhadap belanja bahan pendukung kegiatan Penerapan Standarisasi
- c. Penurunan belanja barang persediaan sebesar -20.25 % yang meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku dikarenakan adanya efisiensi dalam penggunaan barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku
- d. Penurunan belanja jasa sebesar -14.26% meliputi jasa profesi, belanja sewa, langganan daya dan jasa. Penurunan belanja jasa disebabkan oleh kegiatan yang melibatkan narasumber dari luar Kementerian Pertanian berkurang serta adanya efisiensi dalam penggunaan daya dan jasa
- e. Kenaikan belanja pemeliharaan sebesar 61.91% disebabkan karena fasilitas kantor seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sudah waktunya dilakukan pemeliharaan karena sudah memasuki masa manfaat penggunaan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi

sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Kenaikan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 8.70% meliputi perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas paket meeting luar kota untuk mendukung tugas dan fungsi BBPSIP dalam menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (turun) %
Belanja Barang Operasional	3.557.435.700	2.763.016.075	28,75
Belanja Barang Non Operasional	5.744.686.046	6.865.154.272	-12,47
Belanja Barang Persediaan	1.049.710.127	1.316.321.305	-20,25
Belanja Jasa	1.457.889.039	1.700.299.229	-14,26
Belanja Pemeliharaan	2.492.775.041	1.539.591.210	61,91
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.847.407.179	5.159.684.874	8,70
Belanja Perjalanan Luar Negeri	25.469.993	66.914.032	-61,94
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>20.175.373.125</b>	<b>19.410.980.997</b>	<b>3,94</b>
Pengembalian Belanja Barang	926.750	23.083.640	-95,99
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20.174.446.375</b>	<b>19.387.897.357</b>	<b>4,06</b>

terdapat pengembalian belanja barang di Semester II tahun Anggaran 2024 sebesar Rp926,750.00 yaitu terdiri dari :

1. Pengembalian uang perjalanan dinas biasa Rp860,000.00 dalam rangka perjalanan ke Jabar 11 Januari 2024 kegiatan Humas dan RB (kelebihan Persekot TUP1)
2. Pengembalian uang perjalanan dinas biasa Rp45,000.00 dalam rangka perjalanan kegiatan Program dan anggaran TA 2024 (SPM 0080A)
3. Pengembalian uang pembayaran kelebihan belanja langganan telepon sebesar Rp750.00
4. Pengembalian uang kelebihan pembayaran perjalanan atas nama Alfian sebesar Rp21.000

## B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp428,178,000.00 dan Rp490,901,352.00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada Desember 2024 Semester II TA 2024 sebesar 46% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar 12.78% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada akhir tahun 2024 masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran pada belanja modal. Realisasi belanja modal terdiri dari :

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.890.000		100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.288.000	490.901.352	64
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>428.178.000</b>	<b>490.901.352</b>	<b>12,78</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>428.178.000</b>	<b>490.901.352</b>	<b>12,78</b>

#### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp250,890,000.00 dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan adanya realisasi penggunaan belanja modal Peralatan dan Mesin pada semester II TA 2024. Realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. Untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp250,890,000.00 merupakan pembelian yang terdiri dari :
  1. Pembelian A.C Split sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp26.000.000
  2. Pembelian Kamera Udara sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp16.450.000,-
  3. Pembelian alat Komunikasi Telepone Lainnya sebanyak 11 Unit dengan nilai sebesar Rp97.990.000,-
  4. Pembelian Kamera Digital sebanyak 1 Unit dengan nilai sebesar Rp13.750.000,-
  5. Pembelian Personal Komputer Lainnya sebanyak 2 unit Rp36,500,000
  6. Pembelian Rackmount sebanyak 4 buah total harga Rp17,400,000,-
  7. Pembelian Laptop Case sebanyak 2 Rp42,800,000

Tidak terdapat Realisasi dan Pengembalian belanja modal.

#### B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp177,288,000.00 dan Rp490,901,352.00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 64% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada akhir tahun 2024 masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran pada belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.288.000	490.901.352	64
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>177.288.000</b>	<b>490.901.352</b>	<b>64</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>			-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>177.288.000</b>	<b>490.901.352</b>	<b>64</b>

Untuk belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp177,288,000.00 terdiri dari pembelanjaan Pembangunan pengembangan nilai asset tugu/gapura atau tanda batas administrasi kepemilikan.



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1 Kas Lainnya dan Setara kas

Saldo Kas lainnya dan setara kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp451,612,180.00 dan Rp461,802,853.00 dari saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Rincian Kas Lainnya dan setara kas di Bendahara Pengeluaran  
per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas dan Setara Kas	Rp451,612,180.00	Rp461,802,853.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp451,612,180.00</b>	<b>Rp461,802,853.00</b>

Kas lainnya dan setara kas merupakan saldo dari penjumlahan dana Hibah dan kas lainnya di kementerian Negara/Lembaga dari hibah kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Poslulhdes (melalui *capacity buliding* dan *partnership*) yang didanai oleh *Asian Food And Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)* pada bendahara pengeluaran sebesar Rp451,612,180.00

#### C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo pada Piutang bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8,698,000.00 dan Rp0.00 yang merupakan nilai yang wajib dibayar dari pemanfaatan sumber daya negara yang terdiri dari total piutang pengembalian kelebihan tunjangan dan Tugas Belajar atas nama :

1. Enti Sirnawati Rp5,273,000.00
2. Tika Tresnawati Rp3,425,000

Uraian	31 Desember 2024
Piutang bukan Pajak	Rp8,698,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp8,698,000.00</b>

Untuk pencatatan pengembalian Piutang Tunjangan fungsional data di BSIP sebesar Rp8,698,000.00 yang merupakan sisa piutang yang harus dibayarkan atas nama Enti Sirnawati dan Tika Tresnawati. Untuk rekon internal berdasarkan buku besar terjadi selisih dengan nominal tersebut yang merupakan pencatatan piutang tunjangan fungsional sebesar Rp8,698,000.00

#### C. 1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang tidak tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp26,365.00) dan Rp0. Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	5.273.000	0,005	26.365
<b>Jumlah</b>	<b>5.273.000</b>		<b>26.365</b>

Nominal Penyisihan Piutang disesuaikan pada laporan keuangan semester II 2024 berasal dari piutang lancar sebesar Rp5,273,000.00 atan nama Enti Sirnawati Rp5,273,000.00

#### C.1.6 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo bagian Piutang Bukan Pajak (Netto) untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp 8,671,635.00 dan Rp0 dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sesuai dengan surat ketetapan.

No	Nama Debitur	31 Desember 2024
2.	Bagian Lancar Piutang Enti S dan Tika T	Rp8,698,000.00
	<b>Jumlah Piutang Bukan Pajak</b>	<b>Rp8,698,000.00</b>
8.	Penyisihan Piutang Lancar	(Rp26,365.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp8,671,635.00</b>

Untuk saldo bagian Piutang Bukan Pajak (netto) merupakan jumlah dari saldo Piutang Bukan Pajak dikurangi dengan Penyisihan piutang, sebesar Rp8,671,635.00

#### C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp34,928,700.00 dan Rp4,685,500.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	Rp33,974,700.00	Rp4,685,500.00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	Rp33,974,700.00	Rp4,685,500.00
Persediaan Lainnya	Rp954,000.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp34,928,700.00</b>	<b>Rp4,685,500.00</b>

Untuk nominal persediaan sebesar Rp34,928,700.00 merupakan nilai terdiri dari :

Kode	Uraian	Jumlah
<b>117111</b>	<b>Barang Konsumsi</b>	
1010301001	Alat Tulis	1,083,500
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	590,500
1010301003	Penjepit Kertas	320,500
1010301004	Penghapus/Korektor	145,000
1010301005	Buku Tulis	465,000
1010301011	Stadler HD	78,000
1010301006	Ordner Dan Map	7,781,500
1010301007	Penggaris	34,000
1010301010	Alat Perekat	104,700
1010301012	Staples	126,000
1010302001	Kertas HVS	11,446,500
1010302002	Berbagai Kertas	300,000
1010302004	Amplop	2,124,500
1010302005	Kop Surat	995,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	7,914,000
1010304006	USB/Flash Disk	390,000
1010306010	Batu Baterai	76,000
<b>Jumlah Barang Konsumsi (A)</b>		<b>Rp33,974,000.00</b>
<b>117199</b>	<b>Persediaan Lainnya</b>	
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	954,000
<b>Jumlah Persediaan Lainnya (B)</b>		<b>Rp954,000.00</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>Rp34,928,700.00</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 11,807,303,426.00 dan Rp14,454,743,416.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>14,454,743,416.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>11,807,303,426.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	- 11,489,185,297.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>318,118,129.00</b>

### C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16,015,401,867 dan Rp15,838,113,867.00. Terdapat kenaikan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp177,288,000.00 karena pada tahun 2024 ada belanja modal untuk Gedung dan Bangunan. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>15,838,113,867.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Melalui KDP	Rp177,288,000.00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp16,015,401,867</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	- 3,317,507,697
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>12,697,894,170.00</b>

### C.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,544,823,300.00 dan Rp1,544,823,300.00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pada tahun 2024 tidak ada belanja modal untuk jalan. Irigasi dan jaringan

#### C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp442,324,564.00 dan Rp442,324,564.00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pada Aset Tetap Lainnya karena pada tahun 2023 tidak ada belanja modal untuk Aset Tetap lainnya

#### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (16,097,047,934) dan (Rp18,179,500,958.00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	11,807,303,426	11,489,185,297	318,118,129
2.	Gedung dan Bangunan	16,015,401,867	3,317,507,697	12,697,894,170
3	Jalan dan Jembatan	1,118,495,000	1,118,495,000	0
4.	Jaringan	426,328,300	171,859,940	254,468,360
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>29,367,528,593</b>	<b>16,097,047,934</b>	<b>13,748,562,613</b>

### C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45,026,504.00 dan Rp81,046,376.00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Sabilal Fahri, S.Pi, M.Si	45,026,504.00	Rp81,046,376.00
	<b>Jumlah</b>	<b>45,026,504.00</b>	<b>Rp81,046,376.00</b>

Untuk nominal Rp45,026,504.00 merupakan sisa dari pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur atas nama Sabilal Fahri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 atas piutang tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang telah tercatat di modul piutang.

### C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar -Rp225,133.00 dan -Rp405,232.00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	45,026,504.00	0,5%	225,133.00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

Saldo penyisihan piutang merupakan penyisihan dari nilai piutang tagihan TGR sebesar 0,5% dari kualitas piutang lancar. Untuk nominal penyisihan piutang lancar berikutnya akan dilakukan penyesuaian pada laporan Semester II 2024.

### C.3.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)

Saldo Tagihan Tuntutan perbendaharaan/Tgr per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp44,801,371.00 dan Rp81,046,376.00. Adapun perincian nya sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	2023
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR	Rp45,026,504.00	Rp81,046,376.00
Penyisihan Piutang TGR	(Rp225,133.00)	(Rp405,232.00)
Jumlah	Rp44,801,371.00	Rp80,641,144.00

Untuk Saldo Tagihan Tuntutan perbendaharaan/TGR merupakan saldo dari nilai piutang tagihan TGR yang telah berkurang dari tahun sebelumnya 2023 karena

telah dilakukan pembayaran bertahap dan dilakukan penyisihan sebesar 0,5% dari kualitas piutang lancar. Untuk penyisihan piutang lancar berikutnya telah dilakukan pada laporan Semester II 2024.

#### C.4. ASET LAINNYA

##### C.4.1 Aset Lain-lain

Saldo asset lain lain merupakan nilai saldo dari Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan nominal per 31 Desember 2024 Rp 3,272,329,990.00 dan 2023 Rp0,-

Uraian	31 Desember 2024	2023
Aset Lain-lain	Rp3,272,329,990.00	0
Akumulasi Penyusutan	(3,266,529,990.00)	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>Rp5,800,000.00</b>	<b>Rp0</b>

Untuk Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pengajuan usulan penghapusan dari BSIP.

#### C.5. EKUITAS

##### C.5.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14,258,619,109.00 dan Rp14,641,883,853.00 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	31 Desember 2024	2023
Ekuitas	Rp14,258,619,109.00	Rp14,641,883,853.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp14,258,619,109.00</b>	<b>Rp14,641,883,853.00</b>

Terdapat selisih saldo awal ekuitas dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp383,264,744.00 yang diakibatkan oleh adanya defisit LO sebesar (Rp26,376,032,382.00) ditambah transaksi antar entitas Rp25,992,767,638.00

Defisit LO disebabkan :

Beban Operasional :

- |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Beban Pegawai                                   | Rp5,526,523,121.00  |
| 2. Beban Persediaan                                | Rp959,467,947.00    |
| 3. Beban Barang dan Jasa                           | Rp10,760,010,035.00 |
| 4. Beban Pemeliharaan                              | Rp2,552,579,021.00  |
| 5. Beban Perjalanan Dinas                          | Rp5,871,951,172.00  |
| 6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | Rp195,000.00        |

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp810,076,966.00
8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp153,734.00)

Uraian	Jumlah
Beban Pegawai	Rp5,526,523,121.00
Beban Persediaan	Rp959,467,947.00
Beban Barang dan Jasa	Rp10,760,010,035.00
Beban Pemeliharaan	Rp2,552,579,021.00
Beban Perjalanan Dinas	Rp5,871,951,172.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp195,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp810,076,966.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp153,734.00)
<b>Jumlah Beban Operasional (A)</b>	<b>Rp 26,480,649,528</b>
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp1,600,000.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp5,888,146.00
<b>Jumlah PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (B)</b>	<b>Rp7,488,146.00</b>
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp97,129,000
<b>Jumlah KEGIATAN NON OPERASIONAL (C)</b>	<b>Rp97,129,000</b>
<b>Jumlah Defisit LO (A-(B+C))</b>	<b>Rp 26,376,032,382.00</b>

Untuk Nominal Rp7,488,146.00 terdiri :

- Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.600,000,00 merupakan
  - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) Sewa Mess sampai dengan bulan September 2024 Rp1.600,000,00.
  - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess dengan nomor NTPN A92DC48VV95S1MO8
  - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess pembayaran pada bulan Juli 2024
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp5,888,146.00 dari potongan SPM 00472A Rp138,313 dan dari Pendapatan Penggunaan sewa bangunan, yang sudah habis pakai Rp5,749,833.00

Untuk nominal Rp97,129,000.00 terdiri dari :

- Penerimaan kembali belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3,889,000.00 terdiri dari :



- Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp457,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,577,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023 (SPM No. 00921A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp30,000.00 merupakan Kembali uang perjadiin keg. Program TA.2023 (SPM No. 00994A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp700,000.00 yang merupakan Kembali uang biaya transport Keg. Diseminasi Hasil SIP TA.2023 (GU/TUP
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,125,000.00 merupakan Kembali uang biaya penginapan keg. SPI TA. 2023 (SPM LS no 00957A)
2. Penerimaan kembali Pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar RP93,240,000.00 terdiri dari :

Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan penerimaan kembali dari pengembalian pegawai tahun yang lalu sebesar Rp93,240,000.00 sebagai berikut :

Didu Wahyudi	Rp14,220,000.00
Enti Sinarwati	Rp14,220,000.00
Rima Purnamayani	Rp11,700,000.00
Widia Siska	Rp11,700,000.00
Nandang S	Rp31,320,000.00
Angel	Rp10,080,000.00

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,488,146.00 dan Rp17,634,760.00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.600,000.00	3,500,000.00	54.28%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0.00	0.00	0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,888,146.00	14,134,760.00.	58,34
<b>Jumlah</b>	<b>Rp7,488,146.00</b>	<b>Rp17,634,760.00</b>	<b>112.63</b>

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah tamu (guest house) sebesar Rp1,600,000.00

- Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess dengan nomor NTPN A92DC48VV95S1MO8
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess pembayaran pada bulan Juli 2024

Sedangkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa bangunan yang digunakan sebesar Rp5,888,146.00 dan dari potongan SPM 00472A Rp138,313 dan dari Pendapatan Penggunaan sewa bangunan, yang sudah habis pakai Rp5,749,833.00

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,526,523,121.00 dan Rp5,102,229,025.00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,484,249,350	3,327,878,960	4.69
Beban Pembulatan Gaji PNS	47,331	49,007	-3.4
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	249,339,925	240,002,500	3.89
Beban Tunj. Anak PNS	69,421,966	71,284,850	-2.61
Beban Tunj. Struktural PNS	41,090,000	38,560,000	6.56
Beban Tunj. Fungsional PNS	504,518,000	492,860,000	2.36
Beban Tunj. PPh PNS	58,336,419	23,312,064	150.24
Beban Tunj. Beras PNS	175,256,400	188,364,420	-6.95
Beban Uang Makan PNS	415,268,000	324,676,000	27.90
Beban Tunjangan Umum PNS	54,072,087	79,524,460	-32.00
Beban gaji pokok PPPK	142,028,100	17,799,000	697.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,643	294	458.84
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24,000,000	3,180,000	654.72
Beban Tunjangan Beras PPPK	3,258,900	434,520	7400
Beban Uang Makan PPPK	21,571,000	5,550,000	288.67
Beban Uang Lembur PNS	281,416,000	173,031,000	62.64
Beban Uang Lembur PPPK	6,073,000	0	100
<b>Jumlah</b>	<b>Rp5,526,523,121.00</b>	<b>Rp5,102,229,025.00</b>	<b>8.31%</b>

Jumlah Beban pegawai pada Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian mengalami kenaikan sebesar 8.31% dikarenakan adanya mutasi masuk pegawai sebanyak 6 orang ke BBPSIP.

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp959,467,947.00 dan Rp1,315,741,355.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	854,944,347.00	1,254,035,455.00	-31.82
Beban persediaan lainnya	104,523,600.00	61,705,900.00	69.38
<b>Jumlah</b>	<b>Rp959,467,947.00</b>	<b>Rp1,315,741,355.00</b>	<b>-27.07</b>

Beban persediaan konsumsi merupakan alat tulis kantor berupa alat tulis, tinta, penjepit kertas, ordner dan map, cutter, pita mesin tik, alat perekat, stadler, alat pemotong, kertas, amplop, tinta/toner, Flashdisk/USB, lampu listrik, batu baterai dan alat tulis kantor lainnya sebagai bahan pendukung kegiatan. Beban persediaan mengalami penurunan -27.07% dibandingkan tahun 2023 karena penggunaan pada belanja barang persediaan. Untuk beban persediaan Rp959,467,947.00 dengan transaksi pemakaian persediaan habis pakai Rp1,017,692,837.00 terdapat selisih senilai Rp58,224,880.00 yang merupakan nilai dari beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp59,803,980 dikurangi hasil opname fisik (Rp1,774,100) dan Beban Barang Persediaan Lainnya sebesar (Rp195,000)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan (A)	Rp59,803,980
Hasil Opname Fisik (B)	Rp1,774,100
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan (C)	Rp195,000
<b>Jumlah = A-(B+C)</b>	<b>Rp58,224,880</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10,760,010,035.00 dan Rp11,327,373,576.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	3,386,545,575	2,488,449,375	36.09
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86,185,261	61,998,336	39.01
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84,704,864	140,600,000	-39.75

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	5,453,279,380	769,787,000	608.41
Beban Barang Non Operasional Lainnya	291,406,666	103,810,000	435.24
Beban Langganan Listrik	418,526,839	381,713,043	1.38
Beban Langganan Telepon	7,352,950	9,985,426	-26.36
Beban Langganan Air	49,531,500	79,272,000	2.26
Beban Sewa	649,877,000	769,787,000	-15.58
Beban Jasa Lainnya	92,800,000	25,441,760	264.75
Beban Jasa Profesi	239,800,000	409,100,000	-41.38
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	29,846,364	100
Beban Jasa Konsultan	0.00	25,000,000	100
Beban Barang Operasional Lainnya	0.00	16,456,000	100
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0.00	24,570,000	100
<b>Jumlah</b>	<b>10,760,010,035.00</b>	<b>11,327,373,576.00</b>	<b>142.8</b>

Beban bahan digunakan untuk membiayai fotocopy dan perbanyak dokumentasi serta konsumsi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan mengalami Kenaikan sebesar 608.41% karena adanya kegiatan yang melibatkan peserta dari luar kementerian pertanian seperti Bimtek dan kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP.

Beban Jasa Profesi digunakan untuk membiayai narasumber sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Beban keperluan kantor digunakan untuk membiayai honor tenaga kontrak seperti pramubakti, satpam dan pengemudi, tenaga dokter, tenaga kontrak S1, pakaian dinas/seragam pegawai, pakaian petugas kebersihan/pramubakti dan pakaian satpam (beserta perlengkapannya). Beban Honor Operasional Satuan Kerja digunakan untuk membiayai honorarium pengelola anggaran yaitu pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, staf pengelola anggaran, petugas SAIBA dan SIMAK BMN. Beban Langganan Air, Listrik dan Telepon digunakan untuk membiayai operasional air, listrik dan telepon setiap bulannya. Beban barang/Jasa – digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga.

Beban Jasa Profesi mengalami penurunan sebesar -41.38% dari tahun 2023 dikarenakan berkurangnya kegiatan yang melibatkan narasumber baik dari luar Kementerian Pertanian sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2,552,579,021.00 dan Rp1,519,231,570.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,212,525,713	583,738,615.00	92.19
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,280,249,328	935,492,955.00	57.35
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	59,803,980	0.00	100
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2,552,579,021.00</b>	<b>Rp1,519,231,570.00</b>	<b>68.01</b>

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan 92.19% dikarenakan digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan halaman Gedung yang sudah memasuki masa pemeliharaan. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik 57.35% digunakan untuk membiayai pemeliharaan infocus, faximile, mesin tik manual, perawatan jaringan telepon, interkon dan PABX, perawatan peralatan audio sistem, lemari kayu, printer, personal komputer/notebook, AC Split, genset < 50 KVA, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, peralatan jaringan dan instalasi air bersih/PAM, perawatan jaringan kelistrikan, jaringan LAN, operasional kendaraan bermotor, tabung pemadam kebakaran, kamera digital dan perlengkapan video, pemeliharaan CCTV, serta perawatan mess BSIP Cikeumeuh. Untuk Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan pemerintahan.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,871,951,172.00 dan Rp5,224,970,906.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3,703,084,199	3,860,787,272	-4.08
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(926,000)	-1,628,000	-43.12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,058,795,000	1,155,100,000	78.23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	119,807,602	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	85,527,980	23,990,000	256.51
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	25,469,993	66,914,032	-61.93
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5,871,951,172.00</b>	<b>Rp5,224,970,906</b>	<b>12.38</b>

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan menunjang kegiatan pada Balai Besar Penerapan yang dilakukan di luar kantor baik untuk kegiatan Penerapan maupun kegiatan yang menyangkut administrasi kegiatan mengalami kenaikan sebesar 12.38% dari 2023 dikarenakan adanya kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP untuk mendukung tugas dan fungsi BBPSIP dalam menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan.

**D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp195,000.00 dan Rp0.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	195,000.00	0.00	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp810,076,966.00 dan Rp1,047,357,131.00 mengalami penurunan -22.65%. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	389,274,412	379,369,092	2.61
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	60,126,557	120,253,115	-50.00
Beban Penyusutan Jaringan	13,701,706	13,701,706	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	328,686,666	534,033,218.00	-38.45
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	18,287,625		100
<b>Jumlah</b>	<b>810,076,966.00</b>	<b>1,047,357,131.00</b>	<b>-22.65</b>

#### D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp153,734.00 dan Rp135,033.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	153,734.00	135,033.00	13.85



Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
<b>Jumlah</b>	<b>153,734.00</b>	<b>135,033.00</b>	<b>13.85</b>

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp153,734.00 merupakan Pembentukan Penyisihan Piutang Jangka Panjang.

#### D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp97,129,000.00 dan Rp7,237,250.00 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3,889,000.00	300,000.00	1196.33
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	93,240,000.00	6,937,250.00	1244.04
<b>Jumlah</b>	<b>Rp97,129,000.00</b>	<b>Rp7,237,250.00</b>	<b>1242.07</b>

- Penerimaan kembali belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar RP3,889,000.00 terdiri dari :
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp457,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,577,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023 (SPM No. 00921A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp30,000.00 merupakan Kembali uang perjadiin keg. Program TA.2023 (SPM No. 00994A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp700,000.00 yang merupakan Kembali uang biaya transport Keg. Diseminasi Hasil SIP TA.2023 (GU/TUP
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,125,000.00 merupakan Kembali uang biaya penginapan keg. SPI TA. 2023 (SPM LS no 00957A)

- Penerimaan kembali Pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar RP93,240,000.00 terdiri dari :
  - Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan penerimaan kembali dari pengembalian pegawai tahun yang lalu sebesar Rp93,240,000.00 sebagai berikut :

1. Didu Wahyudi	Rp14,220,000.00
2. Enti Sinarwati	Rp14,220,000.00
3. Rima Purnamayani	Rp11,700,000.00
4. Widia Siska	Rp11,700,000.00
5. Nandang S	Rp31,320,000.00
6. Angel	Rp10,080,000.00

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14,641,883,853.00 dan Rp15,197,098,920.00. Nilai ekuitas awal di laporan Ekuitas berbeda dengan nilai ekuitas di neraca Rp14,255,194,109.00 dikarenakan Terdapat selisih saldo awal ekuitas dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp386,689,744.00 yang diakibatkan oleh adanya defisit LO sebesar (Rp26,376,032,382.00) ditambah transaksi antar entitas Rp25,992,767,638.00

Defisit LO disebabkan :

1. Beban Pegawai	Rp5,526,523,121.00
3. Beban Persediaan	Rp959,467,947.00
4. Beban Barang dan Jasa	Rp11,024,238,708.00
5. Beban Pemeliharaan	Rp2,552,579,021.00
6. Beban Perjalanan Dinas	Rp5,607,722,499.00
7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp195,000.00
8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp810,076,966.00
9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp153,734.00)

Uraian	Jumlah
Beban Pegawai	Rp5,526,523,121.00
Beban Persediaan	Rp959,467,947.00
Beban Barang dan Jasa	Rp11,024,238,708.00
Beban Pemeliharaan	Rp2,552,579,021.00
Beban Perjalanan Dinas	Rp5,871,951,172.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp195,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp810,076,966.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp153,734.00)
<b>Jumlah Beban Operasional (A)</b>	<b>Rp 26,480,649,528</b>
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp1,600,000.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp5,888,146.00
<b>Jumlah PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (B)</b>	<b>Rp7,488,146.00</b>
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp97,129,000
<b>Jumlah KEGIATAN NON OPERASIONAL (C)</b>	<b>Rp97,129,000</b>
<b>Jumlah Defisit LO (A-(B+C))</b>	<b>Rp 26,376,032,382.00</b>

Untuk Nominal Rp7,488,146.00 terdiri :

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.600,000,00 merupakan
  - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) Sewa Mess sampai dengan bulan September 2024 Rp1.600,000,00.
  - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess dengan nomor NTPN A92DC48VV95S1MO8
  - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Rp800,000.00 merupakan pendapatan dari sewa mess pembayaran pada bulan Juli 2024
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp5,888,146.00

Untuk nominal Rp97,129,000.00 terdiri dari :

1. Penerimaan kembali belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar RP3,889,000.00 terdiri dari :
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp457,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,577,000.00 Kembali uang perjadiin keg. Peternakan TA.2023 (SPM No. 00921A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp30,000.00 merupakan Kembali uang perjadiin keg. Program TA.2023 (SPM No. 00994A)
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp700,000.00 yang merupakan Kembali uang biaya transport Keg. Diseminasi Hasil SIP TA.2023 (GU/TUP
  - Penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1,125,000.00 merupakan Kembali uang biaya penginapan keg. SPI TA. 2023 (SPM LS no 00957A)
2. Penerimaan kembali Pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar RP93,240,000.00 terdiri dari :

Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan penerimaan kembali dari pengembalian pegawai tahun yang lalu sebesar Rp93,240,000.00 sebagai berikut :

Didu Wahyudi	Rp14,220,000.00
Enti Sinarwati	Rp14,220,000.00
Rima Purnamayani	Rp11,700,000.00
Widia Siska	Rp11,700,000.00
Nandang S	Rp31,320,000.00
Angel	Rp10,080,000.00

Untuk transaksi antar entitas Rp 25,992,767,638.00 berupa jumlah dari :

Akun	Uraian	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	25,672,231,823
313121	Diterima dari Entitas Lain	-129,614,185
391131	Pengesahan Hibah Langsung	450,150,000
Jumlah		Rp25,992,767,638

## E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp26,376,032,382.00) dan (25,511,896,520) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Defisit LO disebabkan :

Beban Operasional :

1. Beban Pegawai Rp5,526,523,121.00
2. Beban Persediaan Rp959,467,947.00
3. Beban Barang dan Jasa Rp10,760,010,035.00
4. Beban Pemeliharaan Rp2,552,579,021.00
5. Beban Perjalanan Dinas Rp5,871,951,172.00
6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp195,000.00
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp810,076,966.00
8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp153,734.00)

Uraian	Jumlah
Beban Pegawai	Rp5,526,523,121.00
Beban Persediaan	Rp959,467,947.00
Beban Barang dan Jasa	Rp11,024,238,708.00
Beban Pemeliharaan	Rp2,552,579,021.00
Beban Perjalanan Dinas	Rp5,871,951,172.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp195,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp810,076,966.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp153,734.00)
<b>Jumlah Beban Operasional (A)</b>	<b>Rp 26,480,649,528</b>
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp1,600,000.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp5,888,146.00
<b>Jumlah PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (B)</b>	<b>Rp7,488,146.00</b>
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp97,129,000
<b>Jumlah KEGIATAN NON OPERASIONAL (C)</b>	<b>Rp97,129,000</b>
<b>Jumlah Defisit LO (A-(B+C))</b>	<b>Rp 26,376,032,382.00</b>

### E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25,992,767,638 dan 24,956,681,453. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Akun	Uraian	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	25,672,231,823
313121	Diterima dari Entitas Lain	-129,614,185
391131	Pengesahan Hibah Langsung	450,150,000
Jumlah		Rp25,992,767,638

### E.4. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 14,258,619,109.00 dan Rp 14,641,883,853.00. untuk saldo ekuitas akhir tersebut merupakan nilai ekuitas awal Rp 14,641,883,853.00 dikurangi dengan nilai dari selisih surplus defisit LO (Rp26,376,032,382.00) ditambah dengan total transaksi antar entitas sebesar Rp25,992,767,638 dan dikurangi dengan penurunan ekuitas sebesar (Rp383,264,744).

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

A. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 24 November 2023 awal Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp 20,744,756,000.00 Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian telah melakukan Sepuluh kali revisi DIPA sebagai berikut :

1. Revisi DIPA I tanggal 05 Januari 2024 Refocusing dan dan realokasi anggaran pada Program NilaiTambah dan Daya Saing Rincian OutPut (RO) sebesar Rp 8.230.162.000
2. Revisi DIPA II 23 Januari 2024 tangga dikarenakan Blokir Automatic Adjustment di Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2.232.645.000 pada Rincian Output (RO) Revisi pada lingkup BBP2TP (34 satker)
3. Revisi DIPA III 10 April 2024 padsa tanggal 30 Januari 2024
4. Revisi DIPA IV Tanggal 15 Februari 2024'- Revisi DIPA penguarangan anggaran pada Rincian OutPut (RO)Standar Instrumen Pertanian kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 sebsesar Rp 570 Juta, Revisi DIPA RO Layanan Perkantaron pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor  
Revisi penambahan anggaran pada program Dukman (RO Humas: Dukungan diseminasi SIP dlm Penas\_300 jt) dan Revisi penambahan anggaran pada program ketersediaan dan akses pangan (lingkup BPSIP)
5. Revisi Dipa V tanggal 25 Februari 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO)Standar Instrumen Pertanian kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 dan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO)
6. Revisi DIPA ke VI tanggal 7 Maret 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian Output (RO) tandar Instrumen Pertanian kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024
7. Revisi DIPA 7 pada 22 April 2024 revisi DIPA RO Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan pada kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024
8. Revisi DIPA 8 pada '28 Mei 2024 dikarenakan Revisi POK pada Rincian Output (RO)pada kegiatan

9. Revisi DIPA Pada '6 Juni 2024 dikarenakan Revisi buka blokir SPAA program teknis dan dukungan manajemen serta buka blokir kegiatan PNPB Penambahan anggaran pada Rincian OutPut (RO) Layanan Pemantauan Evaluasi kegiatan Monitoring Program Strategis Kementerian Pertanian sebesar Rp 200 Juta
10. Revisi DIPA ke 10 pada '7 Juni 2024 dikarenakan Revisi buka blokir kegiatan
11. Revisi DIPA ke 11 pada '15 Juli 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO) Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan kegiatan Penerapan Standar Untuk Peningkatan Produksi Mendukung Program Strategis KEMANTAN
12. Revisi DIPA ke 11 pada Juli 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut(RO) Layanan Perkantoran kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor pengurangan anggaran sebesar Rp 150 Juta dialihkan ke bPSIP Sulbar sebesar Rp 50 Juta untuk pemeliharaan Sumur dan BPSIP Kalbar sebesar Rp 100 Juta untuk pemeliharaan gedung KP
13. Revisi DIPA ke 13 pada '08 Agustus 2024 dikarenakan Revisi DIPA pengurangan anggaran pada Rincian Output (RO) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan sebesar Rp 315.474.000 dialihkan ke Rincian OutPut (RO) Lembaga Penerap Standar yang didampingi
14. Revisi DIPA ke 14 pada '17 September 2024 dikarenakan Revisi DIPA realokasi gaji pegawai sebesar Rp 17.338.000 dan penambahan anggaran belanja modal pengamanan aset pada Rincian OutPut (RO) Layanan Prasarana Internal pembangunan pagar sebesar Rp 179.000.000
15. Revisi DIPA ke 15 pada '24 September 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan sebesar Rp 9.450.000
16. Revisi DIPA ke 16 pada '04 Oktober 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan
17. Revisi DIPA ke 17 pada '07 November 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
18. Revisi DIPA ke 18 pada '20 November 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi



19. Revisi DIPA ke 19 pada '29 November 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan
20. Revisi DIPA ke 20 pada '29 November 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Rincian OutPut (RO) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
21. Revisi DIPA ke 21 pada '19 Desember 2024 dikarenakan Revisi DIPA RO pada Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan sebesar Rp28,314,314,000.00
22. Revisi DIPA ke 22 pada '30 Desember 2024 dikarenakan Revisi DIPA pada Revisi DIPA pada RO Layanan Perkantoran dan yang dibutuhkan sebesar Rp28,314,314,000.00
23. Revisi DIPA ke 21 pada '30 Desember 2024 dikarenakan Revisi DIPA RO Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan Penambahan anggaran hibah judul Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian kegiatan sebesar Rp 461.802.000

B. Pada tahun anggaran 2024 Satker Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian melaksanakan kegiatan Hibah dengan Judul *Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia* (Nomor Register: 28CQ4JVA) total anggaran Rp 1.260.000.000 (USD 90.000.000 floating rate/ year) dari pemberi hibah AFACI, RDA – Republik KOREA.

Adapun untuk realisasi kegiatan AFACI sebagai berikut :

1											
2	NO.	SATKER	JUDUL KEGIATAN	SALDO AWAL	REALISASI PENDAPATAN TA 2024 (TOTAL)	REALISASI BELANJA TA 2024 (TOTAL)	SALDO AKHIR	REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS		TOTAL REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS	KETERANGAN
3								SEBELUM 7 NOVEMBER 2024	SETELAH 7 NOVEMBER 2024		
4	648673		Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Hibah)	461.802.853	450.150.000,00	460.340.673,00	451.612.180,00	262.441.173,00	1.787.500,00	264.228.673,00	
5											
6											
7											

C. untuk Capaian output adalah indikator yang mengukur kemajuan dan realisasi kinerja yang sudah dilaksanakan. Capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran dan digunakan untuk menilai kinerja anggaran untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Satker Balai Besar Penerapan Standar Instrumen pertanian untuk nilai akhir (nilai total/konversi bobot) sebesar 95.24

Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian  
Unit Organisasi : BSIP  
Satuan Kerja : BBPSIP  
Fungsi : BBPSIP 018  
Program : EC, WA

kode	kegiatan	belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6916	Hasil Identifikasi SIP spesifik lokasi	250.000.000	205.482.233	82,19	1	1	standar	100	Maximize
6916	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	9.891.802.000	8.645.194.861	87,40	5000	10428	standar	100	Maximize
6916	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	870.162.000	738.787.712	84,90	1	3	standar	100	Maximize
6918	Layanan BMN	162.723.000	102.373.624	62,91	1	1	standar	100	Maximize
6918	Layanan Umum	1.567.289.000	889.828.711	56,78	1	1	standar	100	Maximize
6918	Layanan Perkantoran	13.210.405.000	12.475.687.382	94,44	1	1	standar	100	Maximize
6918	Layanan Sarana Internal	253.630.000	250.890.000	98,92	2	2	standar	100	Maximize
6918	Layanan Prasarana Internal	684.370.000	177.288.000	25,91	2	2	standar	100	Maximize
6918	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	905.596.000	277.655.456	30,66	1	1	standar	100	Maximize
6918	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	515.639.000	302.047.174	58,58	1	1	standar	100	Maximize
6918	Layanan Manajemen Keuangan	464.500.000	115.675.680	24,90	1	1	standar	100	Maximize

D. Untuk pencatatan pengembalian Piutang Tunjangan fungsional data di BSIP sebesar Rp8,698,000.00 yang merupakan sisa piutang yang harus dibayarkan atas nama Enti Sirnawati dan Tika T. Dalam rekon internal berdasarkan buku besar terjadi selisih dengan nominal tersebut yang merupakan pencatatan piutang tunjangan fungsional sebesar Rp8,698,000.00